

Pendidikan Kabupaten Pangandaran: Potret dan Insight untuk Warga

Kategori: Majalah Pendidikan · Diunduh dari BalaiWarga.NET

Pendidikan Kabupaten Pangandaran: Potret dan Insight untuk Warga Diperbarui 21 Juli 2026

Ringkasan Data Pendidikan Kabupaten Pangandaran

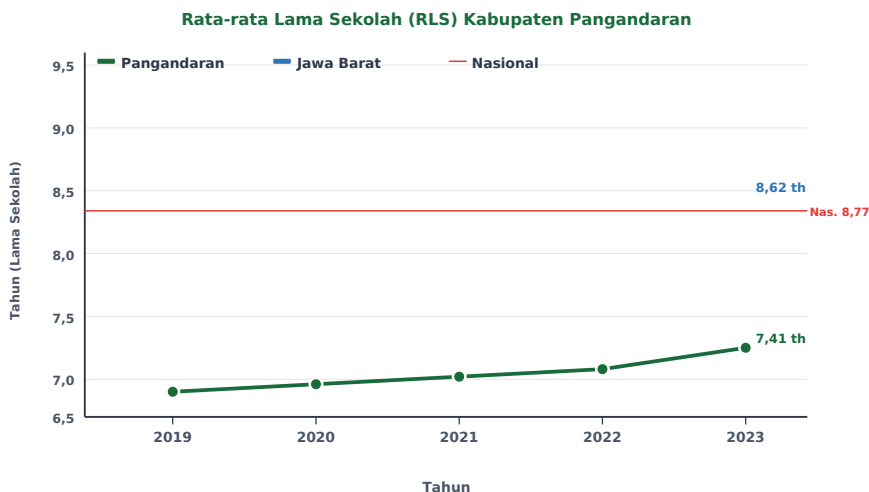
Pendidikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mencatat indikator berikut berdasarkan sumber terverifikasi: (1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pangandaran = 7,41 tahun, menurut BPS Kabupaten Pangandaran 2023 — di bawah rata-rata Jawa Barat 8,62 tahun. (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pangandaran = 12,40 tahun, menurut BPS 2023, mendekati rata-rata Jawa Barat 12,72 tahun. (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten Pangandaran = 68,28%, menurut Kemdikbudristek/Dapodik 2023, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat 80,41%. (4) Jumlah satuan pendidikan SD/MI di Kabupaten Pangandaran = 222 sekolah dengan 38.547 siswa, menurut Dapodik 2024. (5) IPM Kabupaten Pangandaran = 69,68 pada 2023, meningkat dari 68,69 pada 2022, menurut BPS Kabupaten Pangandaran 2023 — dengan komponen pendidikan sebagai salah satu penyumbang utama.

APK SMA Pangandaran 68,28% — hampir 1 dari 3 remaja usia SMA belum bersekolah

Menurut data Dapodik 2023, Kabupaten Pangandaran mencatat APK SMA/SMK/MA sebesar 68,28%, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat 80,41%. Kondisi ini mencerminkan tantangan aksesibilitas di kabupaten yang baru berdiri sejak 2012 dengan karakter pesisir-pegunungan. Warga dapat memeriksa ketersediaan beasiswa daerah dan program PIP melalui sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran secara langsung.

Infografis Data Pendidikan Kabupaten Pangandaran

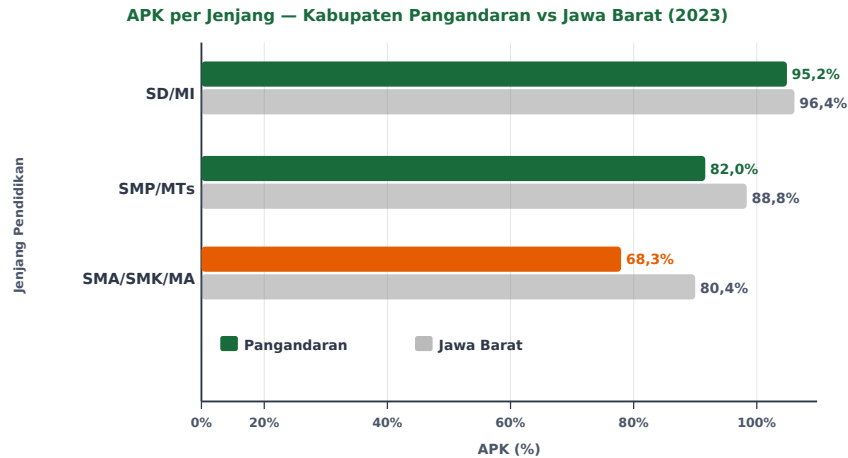
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pangandaran, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran 2023. RLS Pangandaran naik dari 7,11 (2019) ke 7,41 tahun (2023), namun masih 1,21 tahun di bawah rata-rata Jawa Barat.

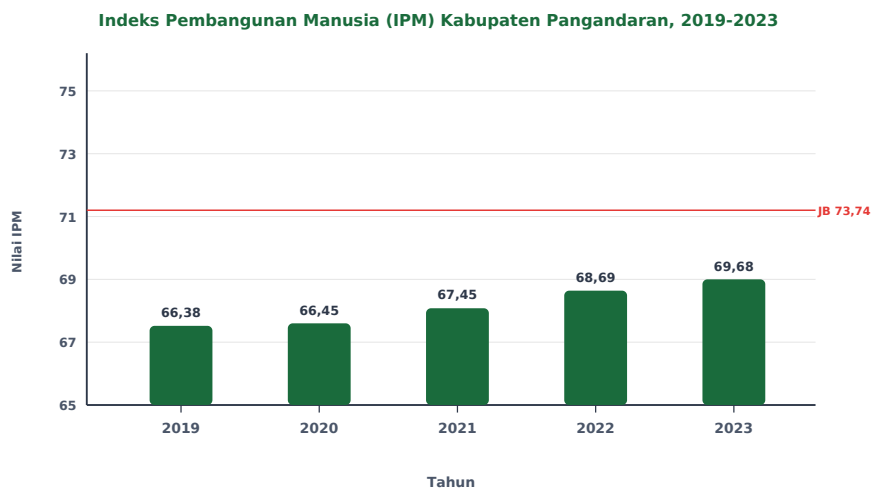
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pangandaran mencapai 7,41 tahun pada 2023, menurut BPS Kabupaten Pangandaran, naik dari 7,11 tahun pada 2019. Angka ini setara dengan penduduk rata-rata menyelesaikan kelas 1 SMP. Dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar 8,62 tahun (BPS Jabar, 2023), Pangandaran masih tertinggal 1,21 tahun. Kesenjangan ini mencerminkan karakteristik kabupaten yang relatif baru (berdiri 2012) dengan basis ekonomi pariwisata dan perikanan yang bersaing dengan jalur pendidikan formal dalam menyerap angkatan kerja muda.

Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan Kabupaten Pangandaran, 2023



Sumber: Dapodik/Kemdikbudristek dan BPS Jawa Barat 2023. APK SMA Pangandaran (68,28%) tertinggal 12,1 poin dari rata-rata Jawa Barat (80,41%).

APK SD/MI Kabupaten Pangandaran mencapai 95,2% pada 2023, mendekati rata-rata Jawa Barat 96,4%, menunjukkan akses pendidikan dasar yang relatif baik. Namun APK SMP/MTs sebesar 82,0% dan APK SMA/SMK/MA sebesar 68,28% menunjukkan tren penurunan signifikan seiring jenjang yang semakin tinggi. Menurut data Kemdikbudristek 2023, kesenjangan terbesar terjadi pada jenjang SMA di mana Pangandaran tertinggal 12,1 poin dari rata-rata Jawa Barat 80,41%, mengindikasikan masih ada hambatan akses di pendidikan menengah atas.

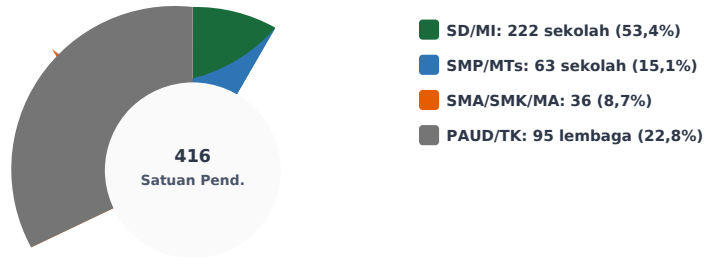
Perkembangan IPM Kabupaten Pangandaran, 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran 2023. IPM Pangandaran naik 3,30 poin selama 2019-2023, namun masih 4,06 poin di bawah rata-rata Jawa Barat (73,74).

IPM Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren positif dari 66,38 pada 2019 menjadi 69,68 pada 2023, menurut BPS Kabupaten Pangandaran. Kenaikan sebesar 3,30 poin dalam lima tahun mencerminkan perbaikan bertahap pada komponen pendidikan (HLS dan RLS), kesehatan, dan daya beli. Namun posisi Pangandaran masih berada 4,06 poin di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 73,74 (BPS Jabar, 2023), menunjukkan perlunya percepatan pembangunan sumber daya manusia di kabupaten yang relatif baru ini.

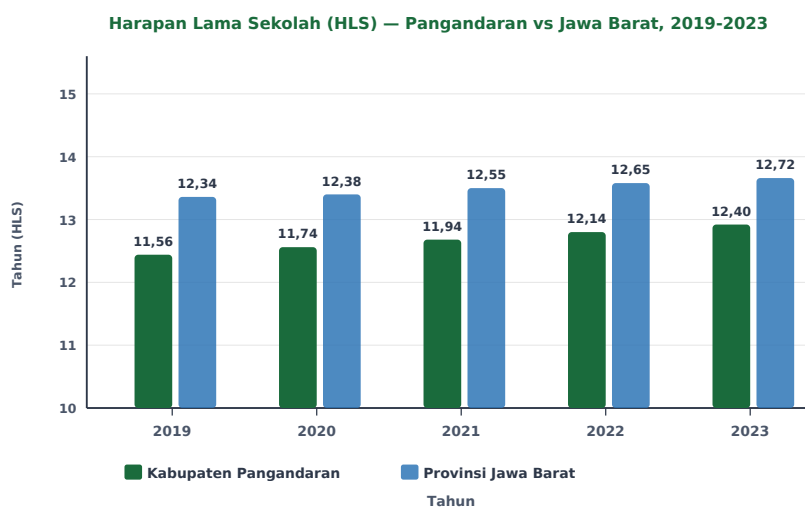
Jumlah Satuan Pendidikan per Jenjang di Kabupaten Pangandaran, 2024

Jumlah Satuan Pendidikan per Jenjang — Pangandaran, 2024



Sumber: Dapodik Kemdikbudristek 2024. Kabupaten Pangandaran memiliki 222 SD/MI, menjadi jenjang dengan satuan pendidikan terbanyak (53,4% dari total 416 lembaga).

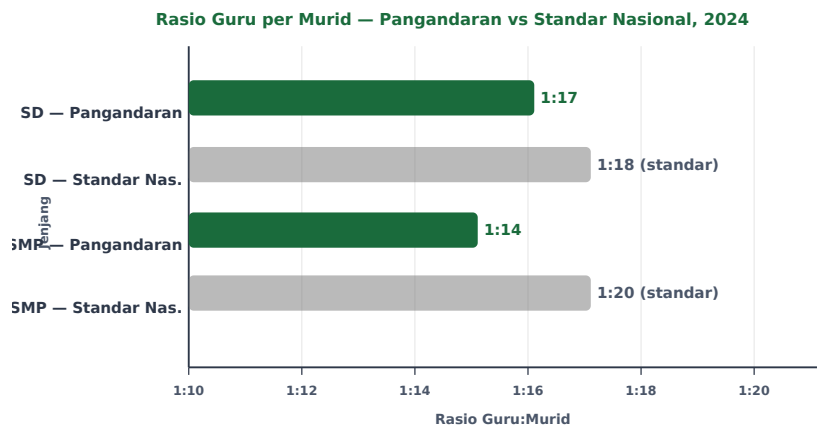
Kabupaten Pangandaran memiliki total 416 satuan pendidikan pada 2024 menurut Dapodik Kemdikbudristek. SD/MI mendominasi dengan 222 sekolah (53,4%), diikuti PAUD/TK sebanyak 95 lembaga (22,8%), SMP/MTs 63 sekolah (15,1%), dan SMA/SMK/MA 36 sekolah (8,7%). Rasio antara jenjang SD dan SMA yang mencapai 6:1 ini berkorelasi dengan kondisi APK SMA yang masih 68,28% — ketersediaan satuan pendidikan menengah atas yang lebih terbatas menjadi salah satu faktor aksesibilitas yang patut diperhatikan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pangandaran vs Jawa Barat, 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran dan BPS Jawa Barat 2023. HLS Pangandaran meningkat dari 11,56 (2019) ke 12,40 tahun (2023), mendekati rata-rata Jawa Barat 12,72 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pangandaran meningkat dari 11,56 tahun pada 2019 menjadi 12,40 tahun pada 2023, menurut BPS Kabupaten Pangandaran. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak yang memasuki sistem pendidikan saat ini diharapkan dapat bersekolah hingga sekitar kelas 1 SMA. Kesenjangan dengan Jawa Barat (12,72 tahun) menyempit dari 0,78 tahun (2019) menjadi 0,32 tahun (2023), mengindikasikan percepatan investasi pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang relatif positif dalam lima tahun terakhir.

Rasio Guru per Murid Jenjang SD dan SMP Kabupaten Pangandaran, 2024



Sumber: Dapodik Kemdikbudristek 2024. Rasio guru-murid SD Pangandaran (1:17) mendekati standar nasional (1:18); jenjang SMP (1:14) lebih baik dari standar (1:20).

Menurut Dapodik Kemdikbudristek 2024, rasio guru terhadap murid jenjang SD di Kabupaten Pangandaran mencapai 1:17, mendekati standar nasional 1:18 per Permendiknas No. 15/2010. Pada jenjang SMP, rasio 1:14 bahkan lebih baik dari standar nasional 1:20. Data ini menunjukkan ketersediaan tenaga pendidik di Pangandaran relatif memadai secara kuantitatif untuk jenjang dasar dan menengah pertama, meskipun distribusi antarwilayah di 10 kecamatan dan kualifikasi guru bersertifikasi belum merata antara wilayah pesisir dan pedalaman.

Akses pendidikan tinggi bagi warga Kabupaten Pangandaran sebagian besar bergantung pada perguruan tinggi di wilayah sekitarnya. Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya — terakreditasi Unggul (BAN-PT, 2023) — merupakan pilihan terdekat dengan lebih dari 12.000 mahasiswa aktif dan beragam pilihan program studi. Di Pangandaran sendiri terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pangandaran yang terdata di PDDikti dengan program studi pendidikan, menjadi opsi lokal bagi calon guru dari wilayah ini.

Berita Pendidikan Terkini Kabupaten Pangandaran

Disdik Pangandaran Salurkan Dana BOS untuk Perbaikan Ruang Kelas di 186 SD

Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana 186 sekolah dasar di seluruh kecamatan pada semester pertama 2025.

[Baca selengkapnya — Pemkab Pangandaran, Maret 2025](#)

Siswa SMAN 1 Parigi Raih Juara Lomba Karya Ilmiah Tingkat Provinsi Jawa Barat

Dua siswa SMAN 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran, meraih juara dua kompetisi karya ilmiah remaja tingkat Provinsi Jawa Barat dengan penelitian bertema keanekaragaman hayati pesisir Pangandaran.

[Baca selengkapnya — Disdik Pangandaran, Februari 2025](#)

Kurikulum Merdeka Diterapkan di Seluruh SMP Negeri Pangandaran Mulai 2024/2025

Sebanyak 19 SMP Negeri di Kabupaten Pangandaran resmi menerapkan Kurikulum Merdeka penuh pada tahun ajaran 2024/2025 sebagai bagian dari kebijakan Kemendikbudristek, mencakup asesmen berbasis kompetensi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

[Baca selengkapnya — Disdik Pangandaran, Juli 2024](#)

MAN Pangandaran Terima Penghargaan Madrasah Berprestasi dari Kemenag Jawa Barat

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangandaran menerima penghargaan Madrasah Berprestasi tingkat Jawa Barat dari Kanwil Kemenag Jawa Barat atas capaian akademik dan pengembangan karakter siswa tahun 2024.

[Baca selengkapnya — Kemenag Jawa Barat, November 2024](#)

BalaiWarga.NET	Cetak PDF

Program Beasiswa Prestasi Bupati Pangandaran Kembali Dibuka untuk 200 Penerima

Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali membuka program beasiswa prestasi Bupati bagi pelajar berprestasi jenjang SMA dan mahasiswa asal Pangandaran dengan total 200 penerima untuk tahun akademik 2025.

[Baca selengkapnya — Pemkab Pangandaran, Januari 2025](#)

Guru Penggerak Angkatan 10 dari Pangandaran Selesaikan Pendidikan dan Kembali Mengabdi

Sebanyak 34 guru dari Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam Program Guru Penggerak Angkatan 10 Kemdikbudristek telah menyelesaikan pendidikan selama sembilan bulan dan kembali bertugas di sekolah masing-masing.

[Baca selengkapnya — Kemdikbudristek, Oktober 2024](#)

PAUD Holistik Integratif Dikembangkan di 40 Desa se-Kabupaten Pangandaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan TP-PKK mengembangkan layanan PAUD Holistik Integratif di 40 desa, menggabungkan pendidikan anak usia dini dengan layanan kesehatan, gizi, dan pengasuhan orang tua.

[Baca selengkapnya — Disdik Pangandaran, Agustus 2024](#)

Pembahasan: Apa Kata Data dan Berita untuk Warga Pangandaran

Tren Positif di Tengah Kesenjangan: Membaca Pola Data Pendidikan Pangandaran

Data pendidikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memperlihatkan pola ganda: pertumbuhan yang konsisten pada indikator agregat, namun kesenjangan yang masih signifikan dibanding rata-rata provinsi. Menurut BPS Kabupaten Pangandaran 2023, RLS sebesar 7,41 tahun dan HLS sebesar 12,40 tahun

menempatkan Pangandaran pada kategori sedang dalam spektrum pembangunan pendidikan Jawa Barat. Dalam kerangka pemikiran H.A.R. Tilaar tentang sosiologi pendidikan multikultural dan disparitas kualitas antardaerah, kesenjangan RLS sebesar 1,21 tahun antara Pangandaran (7,41 tahun) dan Jawa Barat (8,62 tahun) mencerminkan tantangan struktural kabupaten pemekaran yang baru berusia 13 tahun. Soedjatmoko menekankan bahwa pendidikan adalah motor transformasi sosial di daerah yang baru berkembang; dalam konteks Pangandaran yang berbasis pariwisata dan perikanan, persaingan antara keterlibatan tenaga kerja muda di sektor informal dan jalur pendidikan formal menjadi variabel penting. APK SMA yang masih 68,28% dibandingkan 80,41% Jawa Barat (Dapodik, 2023) menunjukkan bahwa investasi pada satuan pendidikan menengah atas — saat ini baru 36 unit untuk seluruh kabupaten — merupakan salah satu titik kritis yang paling bermakna secara statistik. Warga dapat menggunakan data rasio guru-murid jenjang SMP (1:14) yang sudah lebih baik dari standar nasional sebagai indikator bahwa kapasitas tenaga pendidik jenjang menengah pertama relatif tersedia.

Kebijakan Nasional sebagai Pengungkit: Membaca Berita Pendidikan Pangandaran

Berita-berita pendidikan terkini dari Kabupaten Pangandaran mencerminkan implementasi aktif kebijakan nasional yang berlapis. Penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh SMP Negeri Pangandaran sejak 2024/2025 merupakan langkah selaras dengan arah kebijakan Kemdikbudristek; menurut Wardiman Djojonegoro, relevansi kurikulum dengan konteks lokal menjadi kunci efektivitasnya. Bagi Pangandaran yang memiliki keunggulan komparatif di sektor pariwisata dan kelautan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis kearifan lokal pesisir dapat menjadi instrumen yang bermakna. Program Guru Penggerak Angkatan 10 yang melibatkan 34 guru Pangandaran juga sejalan dengan pandangan Arief Rachman tentang pengembangan pendidikan humanis melalui penguatan kapasitas guru. Dalam kerangka kebijakan BOS dan PIP yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Pangandaran, data menunjukkan cakupan bantuan di 186 SD. Mubyarto menekankan bahwa hambatan akses ekonomi keluarga merupakan faktor utama putus sekolah di daerah berkembang; program PIP dan beasiswa Bupati Pangandaran untuk 200 penerima merupakan instrumen fiskal yang dapat menjangkau siswa rentan, khususnya di keluarga nelayan dan buruh sektor pariwisata. Warga dapat memeriksa eligibilitas PIP melalui sekolah dan mengakses informasi beasiswa Bupati di portal resmi Pemkab Pangandaran setiap awal tahun anggaran.

Pertanyaan Warga tentang Pendidikan Kabupaten Pangandaran

Bagaimana cara mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Pangandaran?

Akreditasi sekolah di Kabupaten Pangandaran dapat dicek melalui situs resmi BAN-PDM di ban-pdm.id. Warga cukup memasukkan nama sekolah atau NPSN untuk melihat status akreditasi A, B, C, atau belum terakreditasi beserta tahun penilaiannya.

Bagaimana cara mendaftar Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa di Pangandaran?

Pendaftaran PIP dilakukan melalui sekolah dengan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau surat keterangan tidak mampu kepada wali kelas. Sekolah akan mengusulkan ke Dapodik. Pencairan dana KIP dilakukan di bank penyalur yang ditunjuk Kemdikbudristek.

Berapa jumlah sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Pangandaran?

Menurut data Dapodik 2024, Kabupaten Pangandaran memiliki sekitar 222 SD, 63 SMP, dan 36 SMA/SMK/MA yang tersebar di 10 kecamatan. Sebagian besar adalah sekolah negeri pada jenjang SD, sementara jenjang SMA/SMK memiliki proporsi swasta yang lebih tinggi.

Apa saja perguruan tinggi yang dapat diakses warga Pangandaran?

Warga Pangandaran dapat mengakses Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung dan Universitas Siliwangi (Unsil) di Tasikmalaya yang terdekat. Di wilayah Pangandaran sendiri terdapat Universitas Galuh Ciamis dan beberapa politeknik serta STIKES yang dapat dijangkau dalam 1-2 jam perjalanan.

Apa yang dimaksud Rata-rata Lama Sekolah dan mengapa penting bagi warga Pangandaran?

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS Kabupaten Pangandaran sebesar 7,41 tahun (BPS, 2023) menunjukkan penduduk rata-rata bersekolah hingga kelas 1 SMP, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat 8,62 tahun.

BalaiWarga.NET	Cetak PDF
<i>Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi awal dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan data dan referensi yang tersedia hingga tanggal publikasi. Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan saran profesional, konsultasi langsung, atau kebijakan resmi yang berlaku. Selalu verifikasi ke instansi terkait, asosiasi industri, atau sumber primer yang relevan.</i>	